



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3091-3103

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Implementasi Visa Kunjungan Wisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Nasional Indonesia

J. Ramadhoni

Universitas Gadjah Mada

Email: Ramadhoni948@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) telah menjadi salah satu strategi utama Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, BVK berhasil memperluas akses masuk dari 15 menjadi 169 negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan BVK terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis tematik terhadap dokumen kebijakan, data statistik, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BVK efektif dalam meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, serta mendukung pengembangan destinasi wisata baru. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti lemahnya pengawasan keimigrasian, pelanggaran izin tinggal, serta ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan prinsip keimigrasian selektif. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya sistem pengawasan digital, harmonisasi kebijakan pusat-daerah, dan reformulasi visa untuk kelompok digital nomad. Evaluasi menyeluruh terhadap BVK diperlukan guna memastikan keberlanjutan manfaat ekonomi, keamanan nasional, dan daya saing destinasi wisata Indonesia dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Bebas Visa Kunjungan, Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi, Imigrasi*

Abstract

The Visa-Free Visit (BVK) policy has become one of the Indonesian government's main strategies to increase international tourist arrivals and stimulate national economic growth through the tourism sector. Since the issuance of Presidential Regulation No. 21 of 2016, BVK has successfully expanded entry access from 15 to 169 countries. This study aims to evaluate the implementation of the BVK policy in relation to Indonesia's economic growth and tourism development using a qualitative-descriptive approach based on thematic analysis of policy documents, statistical data, and academic literature. The findings indicate that BVK has been effective in boosting foreign exchange earnings, creating employment opportunities, and supporting the development of new tourism destinations. However, the policy also presents significant challenges, such as weak immigration monitoring, visa overstay violations, and discrepancies between field practices and the principles of selective immigration. Policy implications emphasize the importance of digital surveillance systems, policy harmonization between central and regional governments, and visa reformulation for digital nomads. A comprehensive evaluation of the BVK policy is essential to ensure the sustainability of economic benefits, national security, and the global competitiveness of Indonesian tourist destinations.

Keywords: *Visa-Free Visit, Tourism, Economic Growth, Immigration*

PENDAHULUAN

Mobilitas global telah menjadi salah satu ciri utama zaman modern. Kemajuan teknologi transportasi dan informasi telah mendorong pergerakan manusia lintas batas negara menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan budaya dan alam yang melimpah memiliki daya tarik besar bagi wisatawan mancanegara. Pemerintah Indonesia merespons peluang ini dengan menerbitkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK), terutama melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016, yang memberikan akses masuk tanpa visa bagi warga negara dari 169 negara tertentu, guna meningkatkan kunjungan wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BVK diharapkan menjadi katalisator utama dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata mencatat bahwa pada 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 16,1 juta orang dan menghasilkan devisa sebesar Rp280 triliun. Pemerintah menilai bahwa dengan memperluas akses masuk, Indonesia akan mendapatkan manfaat ekonomi signifikan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya positif, melainkan juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan keamanan, keimigrasian, dan legalitas tinggal wisatawan.

Studi Syakir (2022) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan bebas visa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, terdapat penyalahgunaan fasilitas ini oleh beberapa orang asing, seperti pelanggaran izin tinggal dan aktivitas ilegal. Situasi ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan BVK, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek ketertiban dan keamanan nasional. Keberadaan wisatawan asing yang tidak terdata dengan baik dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum, seperti penyelundupan manusia dan pelanggaran ketenagakerjaan. Dalam skala daerah, kebijakan ini memberikan dampak yang kompleks. Rompis et al. (2021) mencontohkan bahwa di Sulawesi Utara, kebijakan BVK meningkatkan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan dalam pengawasan imigrasi dan tata kelola pariwisata. Hal ini diperkuat oleh temuan Adani et al. (2022) yang mengkaji kebijakan Visa on Arrival (VoA) di Bali dan menemukan bahwa meskipun meningkatkan kunjungan wisatawan, tetap perlu sistem pengawasan ketat untuk mencegah pelanggaran keimigrasian.

Kritik terhadap kebijakan bebas visa juga datang dari kajian teoritis seperti yang diungkapkan oleh Indrady (2020), yang menyoroti ketidakseimbangan antara semangat "international openness" dan prinsip kebijakan selektif keimigrasian Indonesia. Ia berpendapat bahwa kebijakan bebas visa terlalu berfokus pada peningkatan peringkat dalam Travel and Tourism Competitive Index (TTCI), namun abai terhadap potensi risiko jangka panjang terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum. Fenomena digital nomad pasca pandemi COVID-19 menambah kompleksitas kebijakan visa. Octarizal & Kosase (2023) menilai bahwa munculnya gaya hidup nomaden digital yang bekerja sambil berwisata di Indonesia menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan visa dengan pola mobilitas baru. Visa kunjungan wisata tidak lagi relevan untuk kelompok ini karena mereka bekerja secara daring di Indonesia, tetapi menggunakan fasilitas BVK, yang bukan untuk tujuan kerja.

Secara normatif, prinsip keimigrasian Indonesia tetap bertumpu pada asas selektif, yakni hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban negara untuk masuk. Namun dalam praktiknya, perluasan fasilitas bebas visa tanpa filterisasi yang memadai berisiko melemahkan prinsip ini. Oleh karena itu, evaluasi implementasi kebijakan visa kunjungan perlu dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi apakah kebijakan ini masih sesuai dengan kebutuhan nasional, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi visa

kunjungan wisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan potensi kebijakan ke depan. Evaluasi ini penting agar kebijakan yang dirancang tidak hanya bersifat populis atau responsif terhadap tekanan internasional, tetapi juga mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan analisis tematik sebagai teknik utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional. Sumber data diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah (Perpres No. 21 Tahun 2016), laporan statistik Kementerian Pariwisata dan BPS, serta artikel ilmiah relevan yang telah diterbitkan sebelumnya. Penelitian ini tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, melainkan menganalisis pola-pola tematik yang muncul dari data sekunder yang telah tersedia. Kajian dilakukan untuk mengidentifikasi konsistensi antara tujuan kebijakan BVK dan dampaknya terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2017). Proses analisis diawali dengan membaca seluruh data secara holistik, lalu mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan, mengelompokkan kode-kode data berdasarkan kesamaan pola, dan akhirnya menyusun tema-tema utama yang mencerminkan fenomena kebijakan bebas visa dalam perspektif ekonomi dan pariwisata. Tema-tema yang dianalisis antara lain: efektivitas kebijakan BVK dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, tantangan dalam pengawasan keimigrasian, serta kontribusi BVK terhadap pendapatan nasional dan destinasi wisata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas kebijakan imigrasi dalam kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi berbasis sektor jasa.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian ini mengacu pada triangulasi sumber dokumen dan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dari berbagai jurnal terakreditasi. Literatur yang digunakan mencakup 10 artikel ilmiah dengan tema utama kebijakan keimigrasian, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan pariwisata. Teknik pengambilan data dilakukan secara purposif, dengan memilih dokumen dan publikasi yang berisi informasi evaluatif terhadap implementasi kebijakan BVK dari tahun 2016 hingga 2023. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan

kontribusi konseptual dalam mengevaluasi peran kebijakan visa terhadap pembangunan berkelanjutan dan perekonomian berbasis pariwisata di Indonesia.

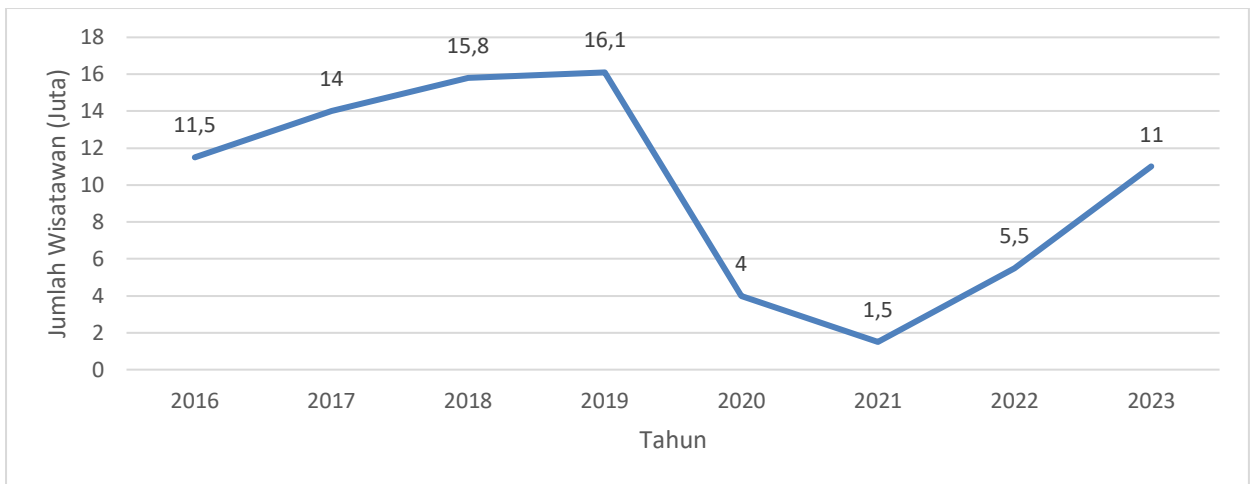
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan, data statistik, dan literatur ilmiah menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016. Kebijakan ini dinilai sebagai strategi nasional untuk mempermudah akses wisatawan internasional, dengan harapan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata. Berdasarkan laporan Kementerian Pariwisata tahun 2019, jumlah wisatawan internasional yang masuk ke Indonesia mencapai 16,1 juta, dan menghasilkan devisa lebih dari Rp280 triliun, yang sebagian besar berasal dari sektor jasa, akomodasi, transportasi, dan kuliner.

Dalam konteks tematik, hasil kajian mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama: (1) efektivitas kebijakan BVK dalam meningkatkan mobilitas wisatawan internasional, (2) kontribusi BVK terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, serta (3) tantangan implementasi kebijakan BVK dari perspektif selektivitas keimigrasian dan keamanan nasional. Ketiga tema ini saling terhubung dan memberikan gambaran yang utuh terhadap dampak, manfaat, sekaligus tantangan dari kebijakan BVK yang telah berjalan hampir satu dekade.

Efektivitas Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ditjen Imigrasi menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah turis asing, terutama setelah perluasan fasilitas BVK kepada 169 negara. Syakir (2022) mencatat bahwa implementasi kebijakan ini berhasil mendorong pertumbuhan signifikan dari pasar wisata utama seperti Australia, Tiongkok, dan Singapura. Lebih jauh lagi, kebijakan ini mendorong penyebaran arus wisatawan ke wilayah yang sebelumnya kurang terdampak secara langsung oleh sektor pariwisata, seperti Labuan Bajo, Wakatobi, dan Danau Toba. Strategi ini mendukung program pemerintah dalam mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata secara lebih merata.



Gambar 1. Grafik Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2023

Sumber : BPS (2024)

Berdasarkan grafik dan data dari BPS (2024) yang ditampilkan, terlihat jelas bahwa jumlah wisatawan mancanegara meningkat secara konsisten sejak 2016 hingga 2019, dengan puncaknya mencapai 16,1 juta kunjungan. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, yang menutup banyak akses internasional. Setelah itu, jumlah kunjungan mulai pulih perlahan, mencapai 11 juta pada 2023, yang menunjukkan peran kebijakan seperti Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa on Arrival (VoA) dalam mendorong sektor ini.

Salah satu aspek penting dari kebijakan BVK adalah munculnya turunan kebijakan seperti Visa on Arrival (VoA), yang turut mendukung kemudahan akses masuk bagi wisatawan. Di Bali, lebih dari separuh wisatawan mancanegara menggunakan fasilitas ini sebagai jalur masuk. Swandana et al. (2023) menunjukkan bahwa kemudahan prosedural, efisiensi waktu, serta biaya yang lebih rendah dibandingkan visa reguler menjadi alasan utama tingginya preferensi terhadap VoA. Hal ini memberikan efek langsung terhadap percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca-COVID-19, di mana banyak negara berlomba-lomba menghidupkan kembali sektor pariwisatanya. Kebijakan ini juga dinilai meningkatkan daya saing Indonesia dalam merebut pangsa pasar wisatawan di kawasan ASEAN.

Namun demikian, dampak positif kebijakan BVK tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah di bagian timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan. Penyebab utama dari ketimpangan ini adalah keterbatasan infrastruktur pariwisata, akses transportasi, dan kesiapan pelayanan imigrasi. Rompis et al. (2021) mencatat bahwa meskipun Sulawesi Utara mengalami peningkatan, daerah-daerah lain masih menghadapi hambatan struktural

dalam menarik wisatawan asing. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan BVK perlu diiringi dengan strategi pendukung, seperti penguatan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan digitalisasi promosi destinasi.

Selain itu, efektivitas kebijakan BVK juga sangat ditentukan oleh stabilitas keamanan dan konsistensi kebijakan antarinstansi. Beberapa studi menyoroti perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar wisatawan tidak menghadapi kebingungan administratif atau perbedaan perlakuan. Menurut Huraerah (2022), kebijakan yang bersifat nasional seperti BVK akan lebih optimal bila didukung dengan kebijakan regional yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal. Disparitas kebijakan dan pelaksanaan lapangan juga bisa menjadi hambatan bagi wisatawan yang mengejar pengalaman lintas-destinasi dalam satu perjalanan.

Kebijakan BVK telah terbukti menjadi instrumen yang strategis dalam menarik wisatawan mancanegara dan mendongkrak sektor ekonomi kreatif yang bergantung pada industri pariwisata. Namun, untuk mencapai pemerataan manfaat, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas SDM pariwisata, dan optimalisasi promosi berbasis digital. Seperti ditegaskan oleh Nurul et al. (2024), kebijakan keimigrasian harus bersifat dinamis dan berorientasi pada kebutuhan pasar global agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, keberhasilan BVK tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pengembangan destinasi baru dan keseimbangan pembangunan wilayah.

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) telah membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam menciptakan efek berganda (multiplier effect) pada berbagai sektor penunjang pariwisata. Berdasarkan kajian Elisabeth & Indrady (2020), pariwisata termasuk sektor yang paling cepat menyalurkan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pemulihan signifikan pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, pariwisata Indonesia menghasilkan devisa sebesar USD 14 miliar, meningkat 82,79% dibandingkan tahun 2019. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 4,01–4,5%. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan sektor jasa lainnya, yang tumbuh 11,36% pada triwulan IV-2024 dan 9,8% sepanjang tahun 2024, seiring dengan meningkatnya aktivitas rekreasi dan kunjungan wisatawan. Jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah wisman mencapai 9,2 juta orang, dengan pendapatan mencapai USD 12,8 miliar. Peningkatan ini didorong oleh promosi agresif, pengembangan destinasi baru, dan peningkatan layanan. Sektor pariwisata juga memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, sektor ini menyerap sekitar 22,89 juta tenaga kerja, meningkat dari 21,26 juta pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dan devisa negara menunjukkan bahwa kebijakan seperti Bebas Visa Kunjungan (BVK) efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ini, diperlukan pengawasan yang adaptif terhadap penyalahgunaan visa dan penguatan infrastruktur di destinasi wisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asing, permintaan terhadap layanan akomodasi, transportasi lokal, makanan, hingga produk kerajinan melonjak, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah destinasi wisata (Barkah, 2024). Fenomena ini menciptakan mata rantai ekonomi yang menyebar dari pelaku usaha hingga tenaga kerja informal, menjadikan pariwisata sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif. Selain itu, studi Nugraha et al. (2023) menyoroti fenomena meningkatnya jumlah wisatawan asing berstatus digital nomad yang memanfaatkan fasilitas visa kunjungan. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai wisatawan biasa, tetapi juga sebagai kontributor aktif terhadap ekonomi daerah dengan menyewa vila jangka panjang, menggunakan jasa coworking space, serta membeli produk dan jasa lokal. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan bahkan melampaui sektor formal, menjangkau ekonomi kreatif dan layanan digital. Di Bali, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya, kehadiran mereka turut menciptakan permintaan baru terhadap fasilitas berbasis teknologi dan kenyamanan kerja jarak jauh, sekaligus membuka ruang kolaborasi internasional yang memperkuat ekosistem inovasi lokal.

Dari perspektif makro, kebijakan BVK juga berdampak positif terhadap peringkat Indonesia dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dirilis oleh World Economic Forum. Indikator "international openness" mencatatkan kenaikan nilai secara konsisten sejak BVK diberlakukan secara luas. Indrady (2020) menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kunjungan internasional memberikan sinyal positif kepada investor dan pelaku pariwisata global tentang iklim usaha yang ramah dan dinamis di Indonesia.

Namun, di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya regulasi domestik yang tetap berpihak pada keamanan nasional dan selektivitas imigrasi, agar keterbukaan tidak menjadi celah bagi aktivitas yang dapat merugikan kepentingan dalam negeri. Meskipun kebijakan BVK menghasilkan keuntungan ekonomi, tantangan yang muncul tidak bisa diabaikan. Syakir (2022) mencatat adanya peningkatan praktik penyalahgunaan visa, di mana beberapa warga negara asing menyalahgunakan status kunjungannya untuk bekerja secara ilegal atau melakukan aktivitas di luar ketentuan. Kondisi ini bisa berdampak negatif pada pasar tenaga kerja lokal dan menciptakan ketimpangan sosial. Jika tidak diantisipasi, efek positif ekonomi dapat terdistorsi oleh dampak sosial yang justru mengurangi kualitas pengalaman wisatawan serta menimbulkan ketegangan antara wisatawan dan warga lokal. Oleh karena itu, sistem pengawasan keimigrasian harus terus diperbarui untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor ini tetap berjalan secara berkelanjutan dan aman.

Aspek pengawasan ini juga harus mencakup kerja sama antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menerima wisatawan perlu dibekali sistem deteksi dini dan pelaporan pelanggaran visa. Rekomendasi dari Yulianti & Setyawan (2021) menyarankan pembentukan satuan tugas pariwisata terpadu yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Imigrasi, Kepolisian, dan Satpol PP untuk memantau pergerakan wisatawan asing, khususnya di wilayah dengan intensitas kunjungan tinggi. Sinergi kelembagaan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan arus wisatawan dan ketertiban sosial di daerah tujuan. Keberlanjutan manfaat ekonomi dari kebijakan BVK membutuhkan strategi jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan peningkatan kuantitas wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengalaman dan kontribusi yang mereka bawa. Menurut Hanan et al. (2024), diversifikasi pasar wisata dan peningkatan standar layanan berbasis teknologi harus menjadi prioritas. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, pariwisata Indonesia perlu mengambil langkah transformatif untuk menjadikan sektor ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tanpa mengorbankan kepentingan keamanan dan kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan BVK bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang aman, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Tantangan dalam Implementasi dan Pengawasan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi BVK adalah lemahnya mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap keberadaan wisatawan asing. Utami (2019) menyoroti minimnya regulasi teknis yang mewajibkan wisatawan asing untuk melaporkan

keberadaannya selama berada di Indonesia. Akibatnya, terdapat banyak kasus wisatawan yang berpindah tempat tinggal secara ilegal atau menetap di Indonesia melebihi batas waktu yang diizinkan. Ketidakhadiran penjamin atau sponsor juga memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hukum. Tantangan lain adalah lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah tidak memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem imigrasi nasional. Hal ini menyebabkan data keberadaan dan mobilitas wisatawan tidak dapat dimonitor secara real time, sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan kebijakan berbasis bukti. Penelitian oleh Rompis et al. (2021) bahkan menemukan adanya disparitas pemahaman antara aparat daerah dan pusat terkait kewenangan dalam pengawasan orang asing.

Dari sisi kebijakan, terdapat ketegangan antara prinsip selektivitas imigrasi dan dorongan global untuk meningkatkan keterbukaan internasional. Indrady (2020) mencatat bahwa tekanan internasional melalui instrumen seperti TICI dan kebijakan neoliberal mendorong negara berkembang untuk mengurangi restriksi visa. Namun, dalam konteks Indonesia, hal ini justru menimbulkan dilema karena prinsip selektif keimigrasian seharusnya hanya mengizinkan warga asing yang benar-benar memberikan manfaat bagi negara. Kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas lapangan menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Selain itu, munculnya fenomena digital nomad pasca pandemi COVID-19 juga memberikan tantangan baru dalam pengelolaan kebijakan visa. Sebagaimana dicatat oleh Nugraha et al. (2023), banyak pekerja lepas asing yang memanfaatkan fasilitas BVK untuk bekerja di Indonesia secara daring, tanpa izin kerja yang sah. Meskipun mereka tidak mengambil pekerjaan lokal, aktivitas ini tetap memunculkan dilema hukum dan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang skema visa khusus yang dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok ini sekaligus menjaga ketertiban dan legalitas di sektor tenaga kerja.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan BVK memberikan dampak yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini berhasil meningkatkan arus masuk wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pariwisata. Di sisi lain, implementasi yang belum optimal menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari pelanggaran izin tinggal, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan prinsip kebijakan selektif. Implikasi kebijakan dari temuan ini mengarah pada perlunya penyusunan sistem pengawasan berbasis teknologi dan integrasi data antar instansi. Pemerintah perlu membangun platform digital yang memungkinkan pelaporan mandiri oleh wisatawan, integrasi data dengan sistem akomodasi, dan

pemantauan pergerakan lintas wilayah. Selain itu, dibutuhkan pelatihan bagi aparat daerah agar memiliki pemahaman yang seragam mengenai kewenangan dan prosedur pengawasan keimigrasian.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, pertumbuhan sektor pariwisata, dan perekonomian nasional. BVK mampu menciptakan efek berantai terhadap sektor jasa, meningkatkan pendapatan devisa negara, dan memperluas kesempatan kerja, terutama di daerah wisata. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak merata dan masih menghadapi tantangan pengawasan, pelanggaran izin tinggal, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa destinasi.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengelolaan BVK harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterbukaan pariwisata dan perlindungan kepentingan nasional. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun regulasi teknis yang mendorong kepatuhan visa serta pelaporan mandiri oleh wisatawan. Selain itu, perlu adanya sistem pelacakan digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat daerah, dan pendekatan kebijakan selektif terhadap negara-negara tertentu berdasarkan risiko keamanan dan manfaat ekonomi.

Pemerintah disarankan untuk menyusun visa khusus bagi digital nomad guna merespons perubahan pola mobilitas global dan menghindari penyalahgunaan BVK. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pelaporan keimigrasian berbasis teknologi, serta pembangunan infrastruktur dan SDM di daerah destinasi wisata sekunder. Evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala dengan pendekatan berbasis data, agar kebijakan BVK tidak hanya bersifat populis, melainkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, P. S., Astutiningsih, S., Wahyono, S., & Sunaryo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Visa On Arrival (VOA) Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Bali. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*.
- BARKAH, R. (2025). PENGARUH WISATAWAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DI DESA TELAGAH KECAMATAN SEI

BINGAI KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- BPS. (2024). Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2024. Tersedia di <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMY/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html>
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The journal of positive psychology*, 12(3), 297-298.
- Hanan, A., Wahim, I., & Gumilar, G. (2024). Manajemen Sinergitas Stakeholder Dalam Membangun Desa Wisata Giong Siu Babakan Kota Mataram. *Jurnal Abdi Anjani*, 2(2), 199-205.
- Herlambang, H., Astutik, S., & Cornelis, V. I. (2024). PERAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNG LEWAT BATAS WAKTU. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10).
- Huraerah, A. (2022). Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance. Nuansa Cendekia.
- Imam, L. S., Wibowo, G. D. H., & Cahyowati, C. (2024). Arrangements for Granting Visas and Immigration Stay Permits for Digital Nomads in Indonesia in View of Legal Certainty. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1), 10-21070.
- Indrady, A. (2021). Neoliberalisme versus kebijakan selektif keimigrasian: Korelasi komponen "international openness" dengan rezim bebas visa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(2), 153-171.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2019). Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019. Kemenparekraf.
- Marudut, J., & Koswara, I. Y. (2023). Problematika Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing (Wna): Suatu Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 305-335.
- Muqorrobin, M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). peran intelijen keimigrasian dalam rangkaantisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Nurul, N., Tambunan, M., & Noviyanti, I. (2024). Strategi ekspansi global perusahaan: Tantangan dan solusi manajemen strategi. *Economist: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,

1(3), 1-11.

- Octarizal, M. A., & Kosase, O. S. (2023). Mobilitas, Kemanfaatan dan Penerapan: Realitas Konseptual pada Visa Digital Nomad di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1505-1511.
- Prasetyo, H., & Nararais, D. (2023). Urgensi destinasi wisata edukasi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 135-143.
- Rompis, H. M., Rembang, M., & Liando, D. M. (2021). Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Daerah Sulawesi Utara. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 38-44.
- Swandana, M. F. (2023). Studi Komparatif: Perbandingan Penerapan Golden Visa di Indonesia Dengan Beberapa Negara lain. *Pelayanan Keimigrasian*, 21.
- Syakir, S. (2022). Penerapan peraturan presiden republik indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan ke indonesia terhadap 169 negara. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 1(10), 568-587.
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ham*, 10(2), 195.